



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI MUTUAL
AGREEMENT PROCEDURE SERTA INTERAKSINYA DENGAN
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN**

TESIS

**Indah Dwi Sepyarini
0806441296**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI MUTUAL
AGREEMENT PROCEDURE SERTA INTERAKSINYA DENGAN
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi**

**Indah Dwi Sepyarini
0806441296**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Indah Dwi Sepyarini

NPM : 0806441296

Tanda Tangan :

Tanggal :

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Mutual Agreement Procedure
Serta Interaksinya Dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan

Penulis : Indah Dwi Sepyarini

NPM : 0806441296

Pembimbing Tesis,

Darussalam, SE,Ak,M.Si,LL.M Int.Tax

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Indah Dwi Sepyarini
NPM : 0806441296
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Mutual
Agreement Procedure Serta Interaksinya Dengan
Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ. (.....)

Pembimbing : Darussalam, SE,Ak, M.Si,LL.M Int Tax (.....)

Penguji : Prof. Dr. Safri Nurmantu, MSi (.....)

Sekretariats Sidang : Dra. Lina M Jannah, MSi (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa pajak melalui Mutual Agreement Procedure serta interaksinya dengan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

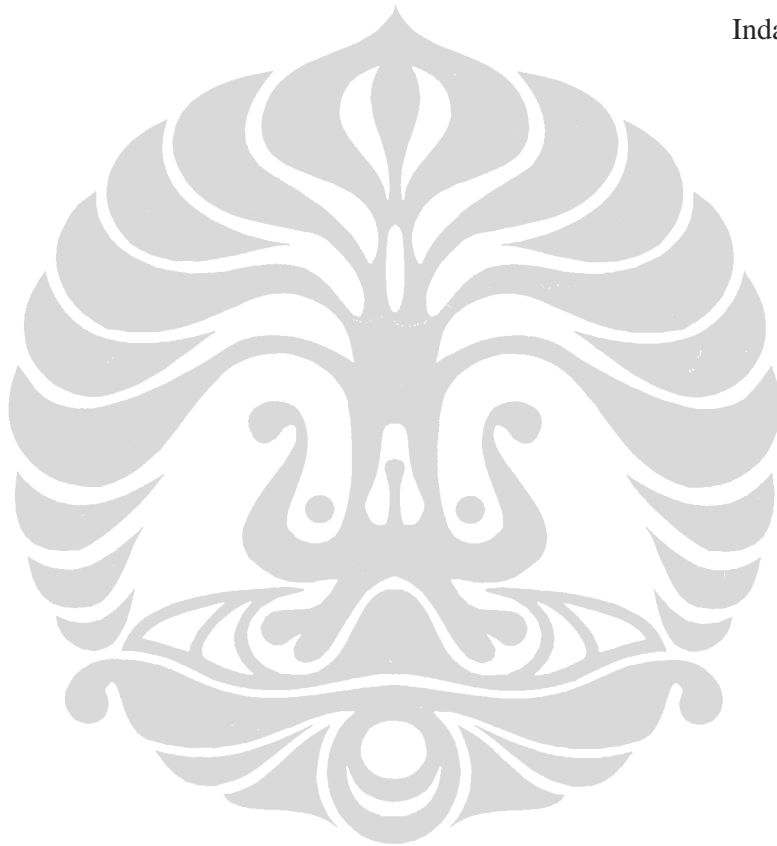
Penulis berharap hasil penelitian ini yang dituangkan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, Msc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di fakultas yang dipimpinnya.
2. Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag.rer. publ sebagai ketua program pasca sarjana dan program studi ilmu administrasi UI pada kesempatan yang diberikan untuk menuntut ilmu di program pascasarjana studi ilmu administrasi.
3. Darussalam, SE, Ak, M.Si,LL.M Int.Tax sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan kasus ini.
4. Prof. Dr. Safri Nurmantu, MSi yang telah memberikan banyak masukan pada waktu sidang tesis sehingga dapat menyempurnakan tesis ini.
5. Para Nara Sumber yang telah bersedia untuk diwawancara atas waktu dan pandangan-pandangan yang berguna bagi penulis: Bapak Rachmanto Surahmat, Prof.Dr. Gunadi, Ak.MSc, Bapak Astera Primanto Bhakti, Bapak Awan Nurmawan Nuh, Bapak Sigit Triono
6. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan moral dan material.
7. Teman-teman yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga semua kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan lapang hati.

Jakarta, Juni 2010

Indah Dwi Sepyarini



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Dwi Sepyarini

NPM : 0806441296

Program Studi : Ilmu Administrasi

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya Ilmiah saya yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Mutual Agreement Procedure serta interaksinya dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2010

Yang Menyatakan

Indah Dwi Sepyarini

ABSTRAK

Nama : Indah Dwi Separini

Program Studi : Ilmu administrasi

Judul : Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Mutual Agreement Procedure Serta Interaksinya dengan Ketentuan Umum dan tatacara perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses penyelesaian sengketa pajak melalui Mutual Agreement Procedure terkait dengan proses keberatan dan banding serta keterkaitan antara hasil Mutual Agreement procedure dengan mekanisme pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. MAP merupakan sarana bagi dua otoritas pajak yang mengadakan P3B untuk menyelesaikan kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan P3B, MAP digunakan sebagai sarana untuk berunding diantara negara mitra P3B dan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa , hasil MAP yang berbeda dengan hasil keputusan keberatan, maka hasil keputusan keberatan tersebut dapat ditinjau kembali tetapi jika hasil banding telah keluar, hasil banding tersebut tidak dapat diubah karena mempunyai kekuatan hukum tetap, cara yang ditempuh wajib pajak adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, Hasil penelitian ini menyarankan agar perlunya penyempurnaan ketentuan MAP dalam ketentuan domestik, aturan mengenai prosedur MAP perlu disempurnakan lagi. Guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak perlu diterapkannya prinsip “lis alibi pendens” pada aturan domestik dan wajib pajak mempunyai hak untuk menerima atau menolak MAP.

Kata kunci: Mutual Agreement Procedure, Pajak Berganda Internasional, Peninjauan Kembali

ABSTRACT

Name : Indah Dwi Sepyarini
Study Program : Administrative Science
Title : Settlement of Dispute in Tax through The Mutual Agreement Procedure As well as Interaction With The General Provision and Procedures of Taxation.

The Objective of research are to identify and analyze how should the process of resolution of dispute in tax through the Mutual Agreement Procedure relating to objection and appeals process and relationship between the Mutual Agreement procedure with the mechanism of article 16 and 36 of the General Provision and Tax Procedures. The approach of research is qualitative while the method is descriptive. MAP is the two of tax authorities to resolve the case entered tax treaty in taxation not accordance with the purpose and objective of tax treaty. MAP is negotiation between tax treaty partner and for taxpayers to eliminate international double taxation. The result of this research concluded that the result of the MAP different with the result of an objection decision, so the result of the objection may be reviewed, but if the appeal had gone out, the outcome of such appeal can not be changed because they have permanent legal force, the way in which the taxpayer is to ask the judicial review to the supreme court. The result of this research suggest the need for improvement in terms of domestic MAP Provision, rules about the MAP procedures need to be refined again. In order to provide legal certainty for taxpayers need the application of the principle of “lis alibi pendens” on domestic rule.

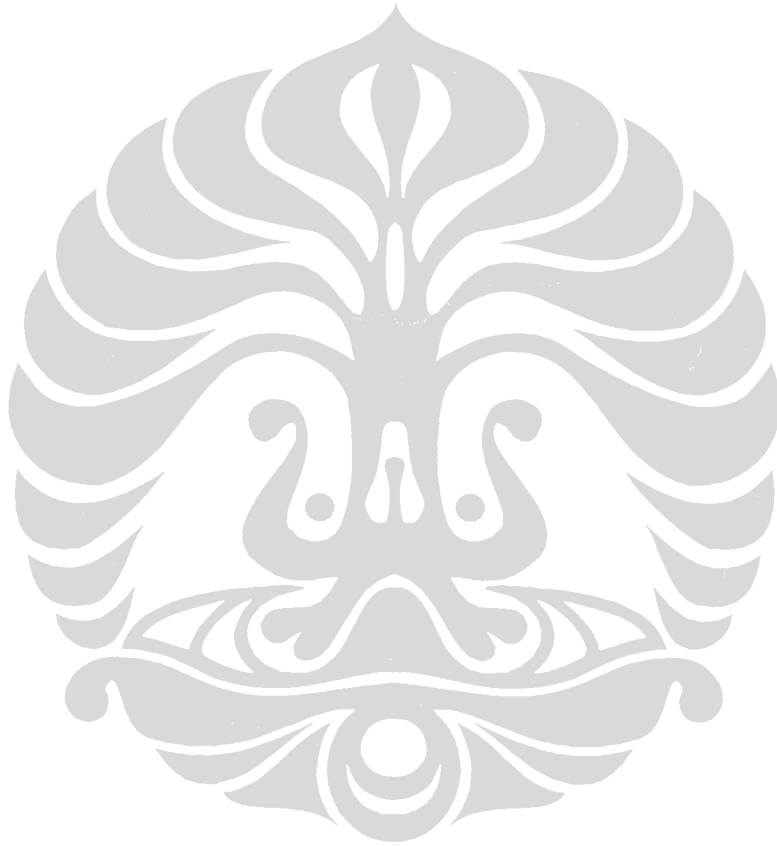
Keywords: Mutual Agreement Procedure, International Double Taxation, Judicial Review

	2.2.7.1	Sengketa Pajak	32
	2.2.7.2	Keberatan	32
	2.2.7.3	Banding	33
2.3		Kerangka Pemikiran	35
3		METODE PENELITIAN	
	3.1	Pendekatan Penelitian	36
	3.2	Jenis Penelitian	37
	3.3	Metode Pengumpulan Data	38
	3.4	Teknik Analisa Data	32
	3.5	Batasan Penelitian	32
4		PENERAPAN DAN ANALISIS MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA INTERAKSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	
	4.1	Sengketa Pajak Internasional	41
	4.2	MAP berdasarkan OECD Model	42
	4.3	MAP Berdasarkan P3B	48
	4.4	MAP Berdasarkan Ketentuan Dometik Indonesia	48
	4.5	Mekanisme MAP Berdasarkan OECD Model	52
	4.6	Kasus-Kasus yang Diajukan ke MAP	56
	4.7	Peran Wajib Pajak dalam MAP	57
	4.8	Penerapan MAP Di Belanda	58
	4.9	Penerapan MAP Di Spanyol	63
	4.10	Dampak Pengajuan MAP terhadap Ketentuan Domestiik di Beberapa Negara	
	4.10.1	Dampak pengajuan MAP terhadap Ketentuan Domestik Di perancis	72
	4.10.2	Dampak pengajuan MAP terhadap Ketentuan Domestik di India	72
	4.10.3	Dampak Pengajuan MAP terhadap Ketentuan Domestik di Kanada	73
	4.10.4	Dampak Pengajuan MAP terhadap ketentuan domestik di Indonesia	73
	4.11	Analisa Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Mutual Agreement Procedure Serta Interaksinya dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	
	4.11.1	Penyelesaian Sengketa Pajak yang tidak sesuai dengan treaty	74
	4.11.2	Analisa Penerapan MAP berdasarkan OECD	78
	4.11.3	MAP dan Ketentuan Domestik	82
	4.11.4	Analisa Ketentuan MAP di Indonesia	83
	4.11.5	Analisa proses berlangnya MAP dikaitkan dengan keberatan dan banding	86
	4.11.6	Analisa MAP terkait Dengan Mekanisme	92

	Pasal 16 dan 36 UU KUP	
4.11.7	Inti Hasil Penelitian	94
4.11.8	Interpretasi Peneliti	95
5	Kesimpulan dan Saran	
5.1	Kesimpulan	98
5.2	Saran	99

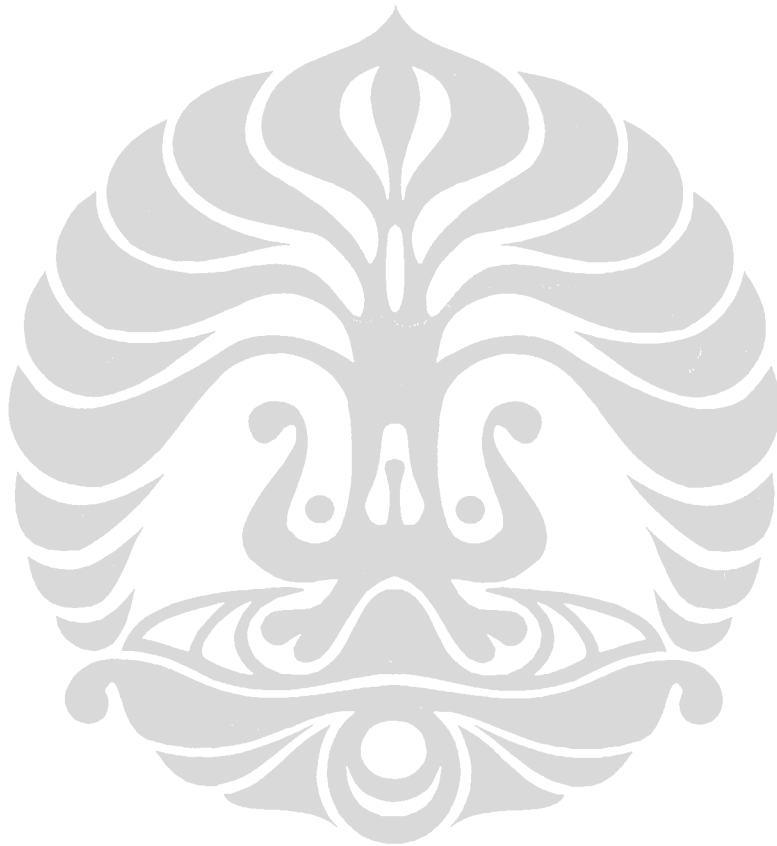
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



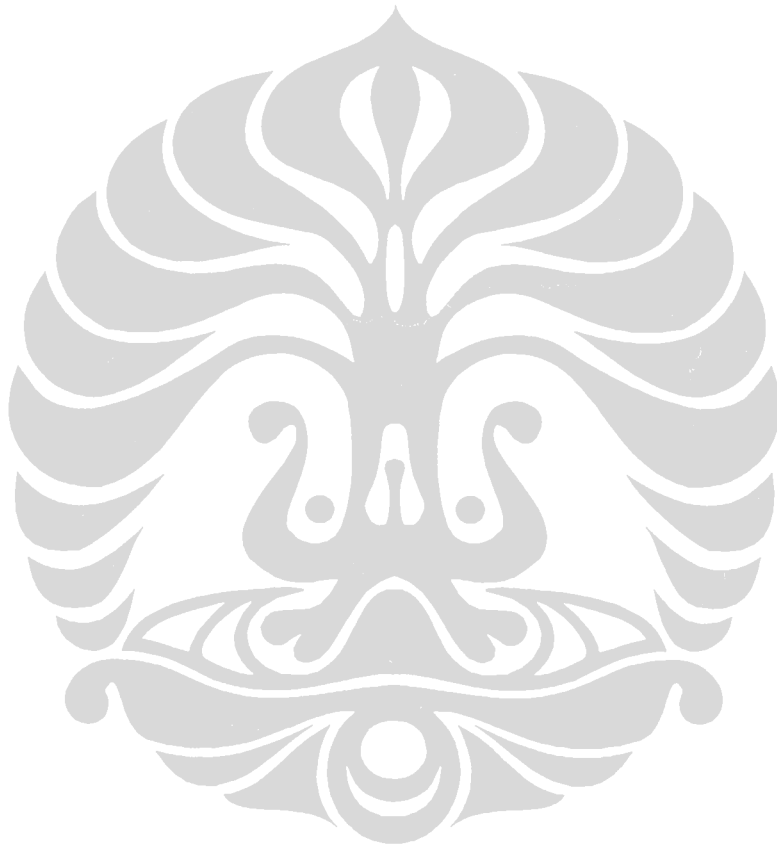
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jangka Waktu Yang Disarankan Dalam Proses MAP	80
Tabel 4.2 Perbandingan Dampak Pengajuan MAP dan Hasil MAP Di Beberapa Negara	82



DAFTAR GAMBAR

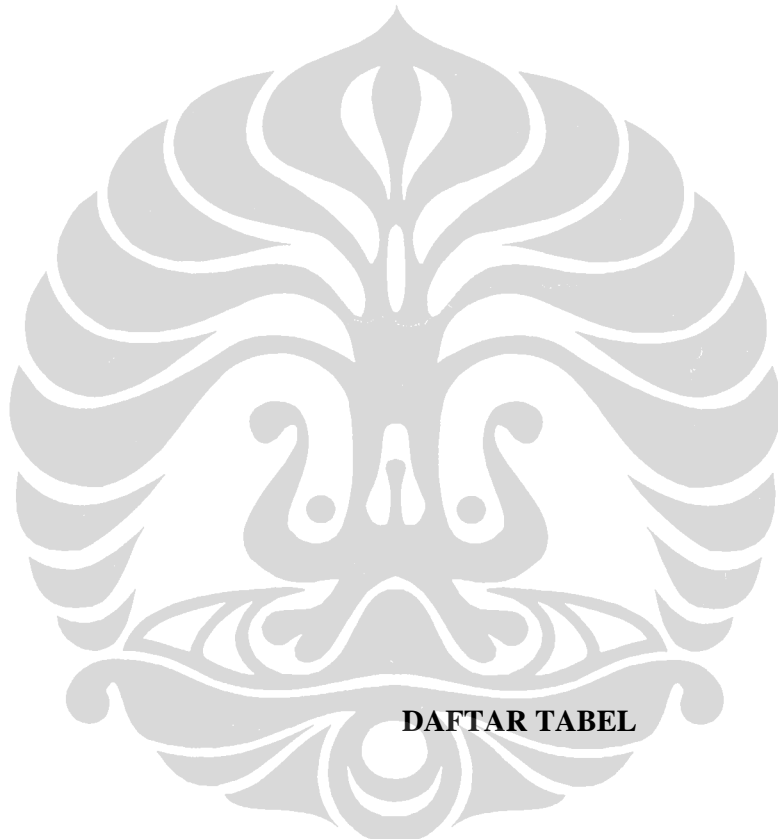
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Daftar P3B Indonesia
- Lampiran 4 Daftar Competent Authority Dari Negara Negara Treaty Partner
- Lampiran 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.10/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Persetujuan Bersama Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda





DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jangka Waktu Yang Disarankan Dalam Proses MAP	89
Tabel 4.2 Perbandingan Dampak Pengajuan MAP dan Hasil MAP Di Beberapa Negara	91



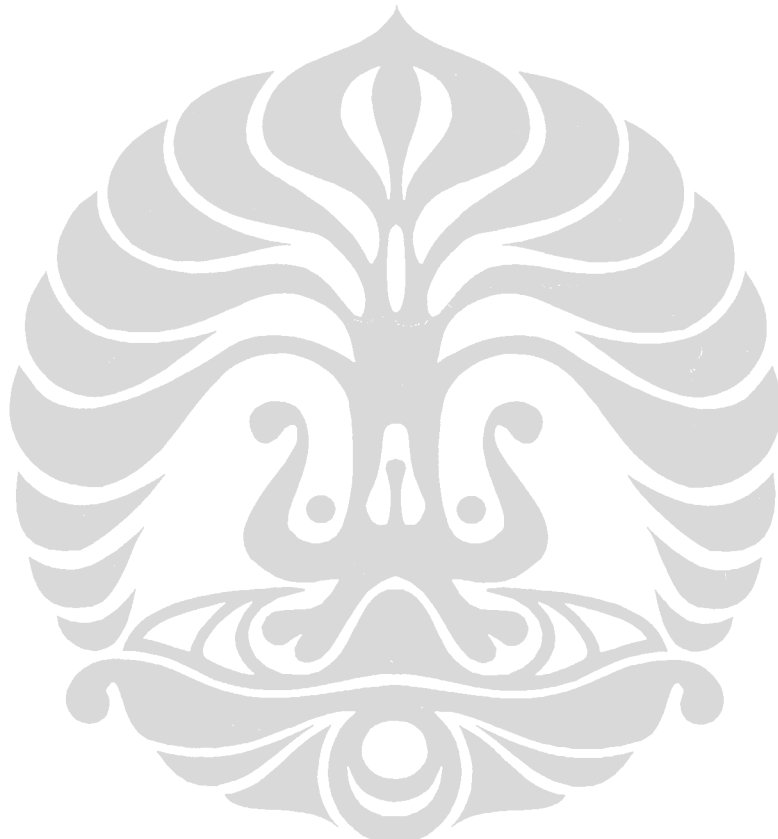
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

38

Gambar 4.1 Skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak

Internasional



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar P3B Indonesia

Lampiran 2 Pejabat yang Berwenang (Competent Authority) Negara Mitra Perjanjian Indonesia

Lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.10/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Persetujuan Bersama Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Lampran 4 Pedoman Wawancara

